

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut (Mulyadi, 2016:24). Senada dengan Huntington (Mulyadi, 2016:24) mengatakan implementasi merupakan perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibro,cabinet atau presiden Negara itu.

Sedangkan menurut Gordon dalam Pasalong (Mulyadi, 2016:24) mengatakan bahwa :

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible.

2.2 Kebijakan

2.2.1 Pengertian Kebijakan

“Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan public. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat”. (Winarno, 2004:14)

Menurut Anderson (Sollahudin Kusumanegara, 2010:1) menyatakan bahwa:

“Kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu”.

Menurut Harbani (Pasalong, 2016:38) menyatakan bahwa : “Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada berbagai keputusan tentang alternatif terbaik”.

Sedangkan menurut Suharto (Suparno, 2017:8) mengatakan bahwa: “Kebijakan merupakan prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”

Definisi lain ditawarkan oleh Friedrich (Agustino, 2016:16) yang menuliskan kebijakan sebagai :

A proposed course of action of a person, group, or government within given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose.

(Tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang yang diusulkan untuk dimanfaatkan dan dilakukan kebijakan berlebih dalam upaya mencapai tujuan atau mewujudkan tujuan)

Sedangkan menurut Eulau & Prewitt (Agustino, 2016:17) yang menyatakan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

2.2.2 Analisa Kebijakan

Patton dan Savicky (Riant Nugroho, 2004:84) yang dengan gamblang menjelaskan bahwa :

Analisa kebijakan adalah tindakan yang di perlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada. Analisis kebijakan bekerja dalam sebuah lingkungan yang serba terbatas : waktu, informasi, bahkan pengetahuan. Analisis kebijakan adalah profesi yang sangat diperlukan oleh setiap pemimpin puncak diberbagai lembaga administrasi publik, pada setiap jenjang.

Sedangkan menurut Dunn (Riant Nugroho, 2004:86) mendefinisikan bahwa:

analisa kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisa kebijakan adalah sebuah bentuk kajian terapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari isu-isu sosial untuk dapat dikedepankan sebuah solusi yang lebih baik. Analisis kebijakan adalah proses intelektual yang mengawali perumusan kebijakan yang biasanya bersifat politis.

2.2.3 Peran Analisis Kebijakan

“Peran analisis kebijakan adalah memastikan bahwa kebijakan yang hendak diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan”. Oleh karena itu, analisis perlu memiliki kecakapan-kecakapan sebagai berikut : (Riant Nugroho, 2004:85)

1. Mampu cepat mengambil fokus pada kriteria keputusan yang paling sentral,
2. Mempunyai kemampuan analisis, multi disiplin jika pun tidak, mampu mengakses kepada sumber pengetahuan diluar disiplin yang dikuasainya
3. Mampu memikirkan jenis-jenis tindakan kebijakan yang dapat diambil
4. Mampu menghindari pendekatan *toolbox* (atau *textbook*) untuk menganalisa kebijakan, melainkan mampu menggunakan metode yang paling sederhana namun tepat dan menggunakan logika untuk mendesain metode jika metode yang dikehendaki memang tidak tersedia
5. Mampu mengatasi ketidak pastian
6. Mampu mengemukakan dengan angka (tidak hanya asumsi-asumsi kualitatif)
7. Mampu membuat rumusan analisa yang sederhana namun jelas
8. Mampu memeriksa fakta-fakta yang diperlukan
9. Mampu meletakkan diri dalam posisi orang lain (empati), khususnya sebagai pengambil kebijakan dan publik yang menjadi konstituentnya
10. Mampu menahan diri hanya untuk memberikan analisis kebijakan, bukan keputusan
11. Mampu tidak saja mengatakan “ya” atau “tidak” pada usulan yang masuk, namun juga memberikan definisi dan analisa dari usulan tersebut
12. Mampu menyadari bahwa tidak ada kebijakan yang sama sekali benar, sama sekali rasional, dan sama sekali komplet
13. Mampu memahami bahwa ada batas-batas intervensi kebijakan publik
14. Mempunyai etika profesi yang tinggi

2.2.4 Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri.

Untuk itu pertama kali harus disadari beberapa hal hakiki dari kebijakan publik adalah : (Riant Nugroho, 2004:101)

1. Intervensi
Meskipun kebijakan publik adalah “apa yang dipilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah” namun sebenarnya yang menjadi fokus adalah apa yang dikerjakan pemerintah karena bersifat aktif
2. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia
Teramat banyak kebijakan publik yang baik akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena tidak didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai.
3. Keterbatasan kelembagaan
Yang dimaksudkan sebagai keterbatasan kelembagaan adalah sejauhmana kualitas praktek manajemen profesional didalam lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, baik yang bergerak dibidang profit maupun non-for-profit
4. Keterbatasan yang klasik tetapi tidak kalah penting
Yaitu keterbatasan dana atau anggaran. Kebijakan tidak dapat dilakukan jika tidak ada dana.
5. Keterbatasan yang bersifat teknis
Yakni berkenaan dengan kemampuan teknis menyusun kebijakan itu sendiri. Hal inilah yang menjadi keunggulan bagi mereka yang pernah memasuki kancah disiplin administrasi Negara/publik, hukum kenegaraan, dan ilmu pemerintahan.

2.2.5 Tahap-tahap kebijakan

“Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji”(Winarno, 2004:28).

Adapun tahapan-tahapan dalam kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus

kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahsan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari kebijakan alternatif tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur, lembaga atau keputusan peradilan

4. Tahap implmentasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah

harus di implementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

2.2.6 Formulasi Kebijakan

Menurut Lester and Stewart (Mulyadi, 2016:8) Formulasi kebijakan adalah :

The stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law.

(Tahap proses kebijakan dimana tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani masalah publik tertentu diidentifikasi dan diberlakukan menjadi undang-undang)

Sedangkan menurut Jones (Mulyadi, 2016: 8) mengatakan bahwa :

Formulation is derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem.

(Formulasi adalah turunan dari formula dan hanya berarti untuk mengembangkan rencana, metode, resep, dalam pengejaran untuk mengurangi beberapa kebutuhan, untuk bertindak atas suatu masalah).

Jadi formulasi kebijakan merupakan tahap awal dari kegiatan pembuatan kebijakan publik, yang melibatkan pemerintah dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan. Formulasi kebijakan merupakan inti dari proses pembuatan kebijakan publik yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dan teruji, untuk menghasilkan alternatif-alternatif solusi yang mengarah kepada pemecahan masalah publik dalam agenda kebijakan tersebut. (Mulyadi, 2016:10)

Adapun tahapan-tahapan dari formulasi kebijakan terdiri dari :

1. Pengkajian masalah kebijakan
2. Penentuan tujuan
3. Pengembangan alternatif
4. Pembuatan model
5. Penentuan kriteria penilaian
6. Penilaian alternatif
7. Perumusan rekomendasi

2.3 Kebijakan Publik

2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik

Jenkins (Agustino, 2016:17) menjelaskan makna kebijakan publik dengan mengatakan bahwa :

“A set of interrelated decision taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actors to achieve”.

(Seperangkat keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor yang menggabungkan pemilihan tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam situasi tertentu dimana keputusan tersebut harus pada prinsipnya, berada dalam kekuatan aktor-aktor tersebut untuk mencapai).

Pada konteks lain Islamy (Sahya Anggara, 2016:500) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut James E Anderson (dalam Subarsono, 2016:2) kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat Pemerintah.

Sementara itu James E Anderson (Agustino, 2016:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai Serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu

yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Sedangkan menurut Theodoulou (Agustino, 2016:18) menyatakan kebijakan publik haruslah dapat menyelesaikan atau mendorong beberapa hal seperti :

“Resolving conflict over scarce resources, regulating behavior, motivating collective action, protecting rights, and directing benefits toward the public interest”

(Menyelesaikan konflik atas sumber daya yang langka, mengatur perilaku, memotivasi tindakan kolektif, melindungi hak, dan mengarahkan manfaat ke arah kepentingan publik)

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama. Pertama, kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu: kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan. Kedua, kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang. Ketiga, kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah. Keempat, kebijakan merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dan bukan apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah. Kelima, kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada rakyat miskin dan lainnya). Tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku Bunga tinggi dan sebagainya). Keenam, kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif untuk yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah sedangkan yang negatif kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun.

Ketujuh, kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3.2 Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2004: 45) terdapat 5 unsur kebijakan diantaranya :

1. Unsur tujuan kebijakan
Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan. Dengan demikian tujuan menjadi unsur pertama dari suatu kebijakan
2. Unsur masalah
Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan
3. Unsur tuntutan (*demand*)
Sudah diketahui bahwa partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju, partisipasi ini dapat berbentuk dukungan, tuntutan, dan tantangan atau kritik seperti halnya partisipasi pada umumnya, tuntutan dapat bersifat moderat atau radikal. Tergantung pada urgensi dari tuntutan, gerahnya masyarakat dan sikap pemerintah dalam menanggapi tuntutan tersebut.
4. Unsur dampak (*Outcomes*)
Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya tujuan. Tiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak dalam masyarakat daripada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan
5. Unsur sarana atau alat kebijakan (*policy instrument*)
Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dimaksud. Beberapa dari sarana ini antara lain : kekuasaan, insentif, pengembangan kemampuan, simbolis dan perubahan kebijakan itu sendiri

2.4 Implementasi Kebijakan

2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik kerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome). (Winarno, 2016:134)

Sedangkan menurut Agustino (2016:126) mengatakan bahwa :

“implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi sebagai kepentingan”.

Menurut Goggin 1990 (Agustino, 2016:128) yang mengatakan “*Implementation can be thought of as a process, an output, and an outcome*” (Implementasi dapat dianggap sebagai proses, output, dan hasil).

Sedangkan Van Meter & Van Horn 1975 (Agustino, 2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Selanjutnya menurut Barret (Agustino, 2016:128) yang menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan sebagai “*translating policy into action*” atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan kedalam

tindakan. Jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Hal ini diperjelas oleh Udoji (Agustino, 2016:129) dengan mengatakan bahwa :

Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan . Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar hanya berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

2.4.2 Proses Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2004:110) dalam pandangannya mengatakan bahwa ada 6 variabel dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna didalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.
2. Sumber-sumber kebijakan
Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-

ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.

4. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administrative yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan subunit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka” yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan

5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik Negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor – faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian pelaksana.

6. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut

dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan. Dalam kondisi seperti inilah persepsi individu memegang peran. Dalam ketidaksesuaian kognitif, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan yang tidak menyenangkan dengan persepsinya tentang apa yang seharusnya merupakan keputusan kebijakan.

2.4.3 Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan

Dalam studi kebijakan terdapat banyak model implementasi kebijakan, diantaranya model implementasi kebijakan model George C. Edwards III (dalam Agustino, 2016:136) model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan *direct and indirect impact on implementation*. Berpendapat bahwa :

Implementasi kebijakan merupakan dampak langsung dan tidak langsung, dari Implementasi terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber daya (*Resource*)
3. Disposisi (*Dispotition*)
4. Struktur birokrasi (*Bureucrati structure*)

Keempat faktor tersebut dijadikan teori dalam penyusunan skripsi ini sehingga pada uraian selanjutnya secara lebih rinci.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Edwards adalah :

1. Komunikasi (*Communication*)

Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan

(atau di komunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. (komunikasi atau transmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan di terapkan kedalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat (atau digunakan) dalam pengukuran keberhasilan variabel komunikasi tersebut menurut Edwards III yaitu :

a. Transmisi

Merupakan penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah satu pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang di terima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat di raih sesuai konten kebijakan.

c. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan di jalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber Daya (Resource)

Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut George C. Edaward dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu :

a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam Implementasi kebijakan Informasi mempunyai dua bentuk yaitu :

1. Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan

2. Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang (*Authority*)

Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi jika, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu di cermati pada variabel disposisi menurut Edward adalah :

a. Efek Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga

b. Pengaturan Birokrasi

Merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja hingga metode *bypassing* personil.

c. Insentif

Menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik menurut Edwards adalah :

a. Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih Fleksibel

SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrasi, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-to-days potics*) sesuai dengan standar yang telah diterapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga)

b. Fragmentasi

Tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

2.5 Konsep Kemiskinan

Dalam ilmu sosial para ahli melihat kemiskinan dalam dua paradigma, pertama apa yang dikenal dengan kemiskinan kultural, kedua adalah apa yang disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan budaya masyarakat

itu sendiri, sedangkan kemiskinan struktural melihat, bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor diluar individu, dimana ada situasi yang menyebabkan orang menjadi miskin berhubungan dengan aturan atau kebijakan. (Indraddin, 2016 :78)

Menurut Smeru (Sjafari, 2014: 16), secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan menurut peraturan presiden (Perpres) No. 96 Tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sumber : (Jurnal,2014 <file:///E:/Jurnal%20pkh/460-4314-1-PB.pdf>)

Menurut Departemen Penerangan RI (1999: 7) faktor penyebab kemiskinan meliputi :

1. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Penguasaan teknologi dan keahlian lain
3. Pemilikan Modal
4. Produktivitas
5. Nilai tukar hasil produksi dan pada gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat pendapatan

Menurut Smeru (2001), kemiskinan memiliki berbagai dimensi, diantaranya:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan kelaurga)
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan soaial masyarakat
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental

Sumber: (<https://www.kompasiana.com/theunsecured/55188a5ca33311bc06b667ae/dimensi-kemiskinan>)

2.6 Konsep Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan, khususnya di Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. (Suharto, 2005:3)

A. Definisi Kesejahteraan Sosial

Menurut Suparlan (Suud, 2006:5) mengatakan bahwa Kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmania,

rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Sedangkan menurut Friedlander Dalam Suud (2006:8) Kesejahteraan sosial adalah :

Sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan, dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.7 Konsep Program Keluarga Harapan

Menurut Permensos No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah :

A. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara Internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa

kehadiran difasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran difasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).

Diatas adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang lawas, atau pada tahun 2014 sehingga masih menggunakan *Millennium Development Goals* (MDGs), belum memakai standar *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dahulu memang PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan program ini. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Sebagai sebuah program bantuan bersyarat PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Program keluarga Harapan ini dianggap

program yang berhasil. Program prioritas Nasional ini oleh Bank Indonesia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Penguatan PKH dilakukan dengan penyempurnaan proses bisnis, perluasan target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan rutilahu pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera.

B. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Adapun Tujuan PKH Menurut Permensos No.1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat

C. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sasaran PKH yaitu sebagai berikut :

- a. Pesisir dan pulau kecil
- b. Daerah tertinggal/ terpencil
- c. Perbatasan antar Negara

Sebagaimana kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial diatas adalah :

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - a. Ibu hamil atau menyusui
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
2. Kriteria komponen pendidikan
 - a. Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - b. Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - c. Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
 - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial
 - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Selain itu, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga (ibu dan anak).

Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun protokol pelayanan kesehatan bagi peserta program keluarga harapan adalah :

- Bayi Baru Lahir (BBL) harus mendapat IMD, pemeriksaan segera saat lahir, vitamin K, HBO, salep mata, konseling menyusui
- Anak usia 0-28 hari harus diperiksa 3 kali: pertama 6-48 jam, kedua 3-7 hari, ketiga 8-28 hari
- Anak usia 0-6 bulan harus diberikan ASI eksklusif
- Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang secara rutin setiap bulan
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sebanyak 2 kali dalam setahun (Februari dan Agustus)
- Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang secara rutin setiap bulan
- Anak usia 5-6 tahun harus ditimbang secara rutin setiap bulan dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) apabila di posyandu terdekat terdapat paud
- Ibu hamil harus melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali
- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 kali pada seminggu
- Anak penyandang disabilitas dapat memeriksakan kesehatan di Dokter spesialis atau psikolog sesuai jenis kecatatan.

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan dan mengikuti kehadiran disatuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan catatan sebagai berikut :

- Anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI sederajat atau SMP/ MTS sederajat). Apabila anak berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan
- Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti pendidikan SD/MI atau SMP/MTS, sedangkan yang tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non regular yaitu SDLB atau SMLB

- Anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan didaftarkan ke lembaga pendidikan regular atau non regular (SD/MI dan SMP/MTS atau paket A dan paket B)
- Anak yang bekerja atau telah meninggalkan sekolah cukup lama, maka harus mengikuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke lembaga pendidikan. Program remedial adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan kemenakertrans untuk anak pekerja.

D. Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan Peserta PKH tidak disamaratakan seperti bantuan BLT, akan tetapi mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Indeks dan komponen bantuan tahun 2020

Skema Bantuan	Indeks bantuan per- KSM/Tahun
Ibu hamil	Rp. 3.000.000
Anak usia dini	Rp. 3.000.000
Anak SD	Rp. 900.000
Anak SMP	Rp. 1.500.000
Anak SMA	Rp. 2.000.000
Penyandang disabilitas berat	Rp. 2.400.000
Lansia	Rp. 2.400.000

Perbedaan komposisi anggota keluarga peserta PKH membuat besaran bantuan yang diterima peserta PKH akan bervariasi, baik per tahun maupun per triwulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga. Apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajiban kepesertaan dalam tiga bulan, maka dilakukan pengurangan bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur, tetapi diprioritaskan untuk pendidikan dan kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkan untuk konsumsi yang merugikan seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya. Besaran bantuan ini akan dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan Negara.

